ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
memenuhi Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

ROSITA SARI
NPM : 1602110434

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ROSITA SARI
NPM : 1602110434

Dengan judul:

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2016-2018

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.	**Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.**	**Maidar, SE, M.Si.**
NIK. 19711019 200405 1 001	**NIK. 19750211 200406 2 001**	**NIK. 19801231 200802 2 001**

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2020

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ROSITA SARI
NPM : 1602110434

Dengan judul:

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH TAHUN ANGGARAN 2016-2018

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 16 Juli 2020

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua	Sekretaris
Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.	**H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.**
NIK. 19700408 199401 1 001	**NIK. 19711019 200405 1 001**
Anggota	Anggota
Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.	**Maidar, SE, M.Si.**
NIK. 19750211 200406 2 001	**NIK. 19801231 200802 2 001**

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

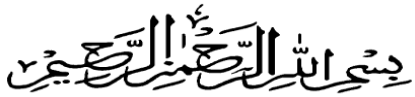

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Analisis Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018".** Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya, cinta, nasehat dan dukungan baik dari segi moril maupun dari segi materil untuk keberhasilan penulis guna tercapainya cita-cita.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Irmawati, SE,M. Si,Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis skripsi ini.
5. Ibu Maidar, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis skripsi ini.
6. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboraturium Akuntansi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan Skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberika manfaat kepada kita semua,terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat megharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya di kemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin*..

Banda Aceh, 11 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **9**
2.1 Anggaran 9
2.1.1 Pengertian Anggaran 9
2.1.2 Manfaat Anggaran 10
2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran 11
2.1.4 Fungsi Anggaran 13
2.2 Anggaran Belanja 15
2.1.1 Pengertian Anggaran Belanja 15
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja 17
2.2.3 Klasifikasi Belanja 17
2.2.4 Belanja Langsung 18
2.2.5 Belanja Tiak Langsung 18
2.3 Realisasi Anggaran 19
2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran 19
2.3.2 Tujuan Realisasi Anggaran 22
2.3.3 Penyusunan Realisasi Anggaran 24
2.3.4 Struktur Laporan Realisasi Anggaran 25
2.4 Efisiensi Realisasi Anggaran 26
2.5 Efektivitas Realisasi Anggaran 28
2.6 Kontribusi Realisasi Anggaran 29
2.7 Pertumbuhan Laporan Realisasi Anggaran 30
2.8 Penelitian Sebelumnya 30
2.9 Kerangka pemikiran 34

BAB III METODE PENELITIAN **36**
3.1 Desain Penelitian 36
3.2 Lokasi Dan Objek Penelitian 37
3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 37
3.4 Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Gambaran Umum BP2IP Malahayati Aceh 40
4.1.1 Sejarah Berdirinya BP2IP Malahayati Aceh 41
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BP2IP Malahayati Aceh 42
4.1.3 Visi dan Misi BP2IP Malahayati Aceh 43
4.1.4 Budaya BLU BP2IP Malahayati Aceh 44
4.1.5 Struktur Organisasi BP2IP Malahayati Aceh 44
4.2 Hasil Penelitian 47
4.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2016 47
4.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2017 47
4.2.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018 48
4.3 Pembahasan 49
4.3.1 Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh 49
4.3.2 Analisis Efektifitas Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh 52
4.3.3 Analisis Kontribusi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh 54
4.3.4 Analisis Pertumbuhan Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58
5.1 Kesimpulan 58
5.2 Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018 4
Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Efisiensi 27
Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Efektivitas 29
Tabel 2.3 Penelitian sebelumnya 33
Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Efisiensi 38
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Efektivitas 38
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016 .. 47
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2017 .. 48
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2018 .. 49
Tabel 4.4 Kriteria Tingkat Efisiensi 50
Tabel 4.5 Efisiensi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018 51
Tabel 4.6 Kriteria Tingkat Efektivitas 53
Tabel 4.7 Efektifitas Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018 53
Tabel 4.8 Kontribusi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018 55
Tabel 4.9 Pertumbuhan Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BP2IP Malahayati Aceh 46

ANALISIS EFISIENSI,EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH TAHUN 2016-2018

ROSITA SARI
NPM : 1602110434

Pembimbing I : Irmawati, SE,M,Si.Ak.CA
Pembimbing II : Maidar, SE,M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018. Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa analisis efisiensi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 sampai 2018 sudah termasuk kategori sangat efisien. Efektifitas realisasi anggaran pada tahun 2016 dan 2017 sudah termasuk kategori efektif, sedangkan pada tahun 2018 termasuk kategori cukup efisien. Analisis kontribusi realisasi anggaran mengalami perubahan secara pluktuatif. Analisis pertumbuhan realisiasi anggaran mengalami perubahan secara pluktuatif.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan, Realisasi Anggaran Belanja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Tolak ukur keberhasilan penganggaran ini hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja dan apabila terjadi defisit atau surplus anggaran berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dengan adanya tolak ukur keberhasilan seperti itu maka terbentuklah pemikiran bahwa penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus seratus persen (100%) agar tidak terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Diterapkanlah anggaran berbasis kinerja yang ditujukan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Anggaran berbasis kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran dana yang diminta, besarnya biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan program data yang dapat mengukur pencapaian program yang akan dilaksanakan.

Tujuan Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang

digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan efektivitas (Hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Pelaksanaan program tanpa terjadinya efektivitas maka akan sama dengan membuang sumber daya karena penggunaan sumber daya tersebut tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan digunakannya sumber daya tersebut. Sedangkan untuk Mengukur nilai efisiensi adalah dengan membandingkan antara (*Output)* yang dihasilkan terhadap Input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu *(Outcome)* dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya serendah-rendahnya. Pada umumnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dilandasi oleh dua Undang-undang di bidang otonomi daerah yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan aspirasi daerah di Indonesia yang menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Kewenangan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi tersebut akan memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah.

Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi fiskal yaitu, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom sehingga pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber

penerimaan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Belanja dalam Realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran. Maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Realisasi anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Menurut Mahmudi (2010:135) Realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

yang utama. Berdasarkan Realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Laporan Keuangan BP2IP Malahayati Aceh Tahunan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Adapun Tabel realisasi anggaran belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018 dapat di lihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Ringkasan Realisasi anggaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018

Uraian	2016		%	2017		%	2018		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	24.382.201.000,-	28.631.373.862,-	117,43	23.014.125.000,-	22.939.480.292,-	99,68	32.774.045.000,-	24.234.401.257,-	73,94
Belanja	105.032.343.000,-	95.966.293.842,-	91,36	128.511.444.000,-	117.313.799.416,-	91,28	132.708.064.000,-	114.881.298.633,-	86,56

Sumber : LRA BP2IP Malahayati AcehTahun 2016-2018

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 28.631.373.862,- atau mencapai 117,43% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 24.382.201.000,-. Sedangkan realisasi belanja Tahun 2016 sebesar Rp.95.966.293.842,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 105.032.343.000,-. Selanjutnya realisasi Pendapatan pada Tahun 2017 berupa pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 22.939.480.292,- atau mencapai 99,68% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 23.014.125.000,-. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2017 mencapai Rp.117.313.799.416,- atau mencapai 91,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 128.511.444.000,-. Kemudian realisasi Pendapatan Tahun 2018 dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum,

Pendapatan BLU Lainnya, Pendapatan PNBP Lainnya dan pendapatan dari pelayanan BLU sebesar Rp. 24.234.401.257,- atau mencapai 73,94% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.32.774.045.000,-. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2018 mencapai Rp. 114.881.298.633,- atau mencapai 86,57% dari alokasi anggaran sebesar Rp.132.708.064.000,-.

Berdasarkan survey awal dan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh selalu mengalami kelebihan (Surplus) anggaran, Kelebihan anggaran ini disebabkan dengan kurangnya pemanfaatan anggaran akibat kekurangan belanja tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kelebihan anggaran. Kelebihan anggaran juga disebabkan dengan kurangnya program-program tertentu sehingga kurang pemanfaatan dalam menghabiskan jumlah anggaran yang telah ditentukan.

Penelitian sebelumnya pernah di teliti oleh Rusita (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari Tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*). Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada Tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Terkait dengan masalah tersebut, kiranya perlu dilakukan suatu analisis terhadap Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan dalam realisasi anggaran. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian ini yang berjudul **"Analisis Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan**

Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018"

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. **Manfaat Praktis**

a. Menambah bukti praktis mengenai Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.
b. Dengan diketahuinya Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018 diharapkan kedepannya semakin baik dan optimal.

2. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah literatur mengenai tentang analisis Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.
b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018. Dengan unit analisisnya Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Realisasi anggaran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Menurut Bastian (2010:165) berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. selanjutnya Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa Tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyususunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Selanjutnya Nafarin (2013:11) Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Kemudian Hafiz (2013:81) mengatakan bahwa anggaran merupakan

pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Sedangkan Menurut Sasongko dan Parulian (2015:2) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk Tahun depan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran yaitu sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program atau rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

2.1.2 Manfaat Anggaran

Menurut Rudianto (2012:194) Anggaran memiliki banyak manfaat dalam kegiatan perusahaan atau organisasi yaitu antara lain :

1. Dapat memotivasi pegawai.
2. Menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai.
3. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
4. Segala bentuk kegiatan perusahaan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
5. Alat pendidikan bagi manajer.
6. Menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang tidak perlu.
7. Memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang digunakan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
8. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha.
9. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif.
10. Membantu dan menunjang kebijaksanaan suatu perusahaan atau organisasi.
11. Mengerahkan seluruh tenaga kerja dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan.
12. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan.

13. Menentukan tujuan-tujuan suatu perusahaan.
14. Mengetahui kelemahan-kelemehan dalam suatu perusahaan atau organisasi.
15. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan.
16. Adanya suatu perencanaan yang terpadu dalam pekerjaan perusahaan.

Selain itu penyusunan anggaran memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Adanya suatu perencanaan terpadu
   Anggaran memiliki manfaat sebagai alat penyusunan rencana suatu perusahaan serta untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi secara menyeluruh.
2. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan
   Anggaran yang disusun dengan baik akan menerapkan standar relevan dan memberikan pedoman bagi setiap perusahaan dalam menentukan langkah yang akan ditempuh agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
3. Sebagai alat pengawasan kerja
   Target sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran, dan target tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya dengan baik. Dalam menentukan standar dalam acuan, diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis secara seksama terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi.
4. Sebagai alat pengkoordinasian kerja
   Anggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern suatu perusahaan. Sistem anggaran memberikan gambaran operasi perusahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antara bagian (divisi).
5. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan
   Anggaran dapat memberikan pedoman yang baik dan berguna bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah.

2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun anggaran yang haruus disusun

perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran, menurut Rudianto (2012:197) pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran yaitu :

a. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup:

1. Anggaran Pendapatan

   Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada diluar kendali manajemen penjualan, misalnya, keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing. Sehingga manajer pemasar tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.

2. Anggaran Biaya

   Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi:

   a. Anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang.
   b. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang.
   c. Anggaran biaya *overhead* adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong, anggaran biaya pabrikase, dll.
   d. Anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Anggaran biaya ini mencakup anggaran biaya iklan, biaya angkut penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, dll.
   e. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrati di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup anggaran biaya listrik, air, telepon, gaji pegawai, biaya bunga, dll.

3. Anggaran Laba

   Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaralan laba merupakan rangkuman dari ke

seluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu anggaran laba dapat digunakan untuk:

a. Mengalokasikan sumber daya.
b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi.
c. Alat pengecek akhir tentang efisiensi dianggarkan.
d. Membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi.

b. Anggaran keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini pendukung upaya untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan, anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggara, yaitu;

1. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti: pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya.
2. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
3. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang, berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang.

2.1.4 Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010:63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendaliaan memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.

7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Nafarin (2013:5) seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan)
   Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)
   Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

3. *Actuating* (Menggerakkan)
   Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap seumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. *Controlling* (Pengendalian)
   Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Kemudian Sasongko (2015:4) berpendapat bahwa kelompok fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

2. Koordinasi
   Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi
   Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahan.
4. Pengendalian
   Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.2 Anggaran Belanja

2.2.1 Pengertian Anggaran Belanja

Menurut Rahmawati (2012:15) Belanja adalah belanja yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Kemudian menurut Halim (2012:68) Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode Tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu Tahun.

Sedangkan Erlina (2016:153) berpendapat bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahunan anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi basil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegi atan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja adalah pengeluaran dari kas negara atau daerah dalam suatu periode Tahunan untk keperluan pemerintahan.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja menurut Mangkunegara (2011:68) adalah:

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi.
2. Berani mengambil resiko.
3. Memiliki tujuan yang realistis.
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan.
5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan.
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.2.3 Klasifikasi Belanja

Rochmansjah (2010: 69) berpendapat bahwa belanja daerah menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial. Selanjutnya Chabib (2010: 99) Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian Purnomo (2013:43) menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi belanja adalah menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

2.2.4 Belanja Langsung

Menurut Purnomo (2013:43) belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2.5 Belanja Tidak Langsung

Menurut Purnomo (2013:45) Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c. Belanja Subsidi
   Belanja subsidi digunakan untuk menganggarakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d. Belanja Hibah
   Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Balanja Bagi Hasil
   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu.
g. Bantuan Keuangan
   Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.
h. Belanja Tidak Terduga
   Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.3 Realisasi Anggaran

2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Wiratna (2015:62) Realisasi anggaran Belanja adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukan jabatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa Realisasi anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu Tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan beberapa program kedalam rencana keuangan Tahunan yang lebih kongkret. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan perealisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menurut SAP 2010 menyatakan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya Wiratna (2015:57) mengatakan bahwa Realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan Nordiawan dan Ayuningtyas (2015:122) Realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhitsar sumber, alokasi dan pemakain sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran merupakan suatu laporan yang menyajikan jumlah anggaran atau alokasi dana yang di terima dan di realisasi dalam pengelolaan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam satu periode tertentu.

2.3.2 Tujuan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas perubahan dan realisasi anggaran Tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu Tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu Tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Tujuan standar Realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi tujuan perealisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan perealisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015:94) manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efesiensi, efektif dan hemat sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015:45) tujuan realisasi anggaran belanja adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran

menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam realisasi anggaran harus diidenfikasikan informasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika dianggap perlu seperti berikut ini:

a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifkasi lainnya.
b. Cakupan entitas pelaporan.
c. Periode yang dicakup.
d. Mata uang pelaporan dan
e. Satuan angka yang digunakan.

2.3.3 Penyusunan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga :

a. Membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan.
b. Semua dokumen sumber transaksi diproses dalam penyusunan laporan keuangan.
c. Kementerian negara/lembaga melakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar .
d. Kementerian Negara/lembaga wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPA-EI).
e. Kementerian negara/lembaga menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan Tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang di tandatangani oleh Kepala satuan kerja dan wajib disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1 dan KPPN.

Menurut Wiratna (2015:64) Dalam menyusun realisasi anggaran bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan dan perhitungan biayanya dalam penyusunan berpedoman pada Belanja dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Belanja pegawai yang tidak langsung yang seringkali disebut dengan belanja pegawai merupakan pengeluaran rutin yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang ada di daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah untuk membiayai kebutuhan pegawainya.
b. Belanja langsung, terdiri dari :
    1. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang jasa dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun anggaran.

2. Belanja Modal
   Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Belanja modal, terdiri dari :
   a. Belanja Modal Tanah
      Dalam belanja modal tanah diisi jumlah biaya yang diperlukan baik pengadaan,pembeliaan, pembebanan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah.

   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      Dalam belanja modal peralatan dan mesin diisi jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan.
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
      Belanja modal gedung dan bangunan termasuk jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan.

2.3.4 Struktur Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas. Struktur Realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain:

1. Pendapatan

   a. Pendapatan (basisi kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
   b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja
   a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer

   Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau Defisit

   Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan *(Financing)*

   Pembiayaan *(Financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.4 Efisiensi Realisasi Anggaran

Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secata matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan isitilah lain *output* per unit *input*. Kemudian Mahmudi (2011:22)

Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut.

Sedangkan Mardiasmo (2009:98) efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Realisasi anggaran. Halim (2014:65) menyebutkan bahwa Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.5 Efektivitas Realisasi Anggaran

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Selain itu menurut Mardiasmo (2009:132) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak *(outcome)* dari keluaran *(output)* program dalam mencapai tujuan program.

Menurut Halim (2014:271) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan untuk belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{X } 100\%$$

Sumber : Halim (2014)

Metode analisis dimulai dengan perhitungan tingkat efektifitas. Untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun anggaran 2016-2018. Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efektivitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.6 Kontribusi Realisasi Anggaran

Menurut Handoko (2013:3) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah sendiri

merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Adapun rumus untuk menghitung Kontribusi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{Realisasi\ \ Belanja}{\text{Pendapatan}}\ \text{X}\ 100\%$$

Sumber : Handoko (2013)

2.7 Pertumhuban Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Halim (2012:53) Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Analisis Pertumbuhan Belanja Dapat Dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun (t}-1)}{\text{Anggaran Belanja Tahun t}}\ \text{x}\ 100\%$$

Sumber : (Halim:2012)

2.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya Sunanto (2017) meneliti tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan Pengukuran Kinerja APBD atas penerimaan pendapatan asli daerah untuk rasio efisiensi adalah efisien karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% (X<100%). Namun, untuk rasio efektivitas adalah tidak efektif dikarenakan realisasi tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditentukan.

Kemudian Melania (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA kota manado Tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada Tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada Tahun 2013. Pada Tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada Tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas Masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh bappeda kota manado. Tingkat atau kriteria efisiensi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya Tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Selanjutnya Roland (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan dari tingkat perhitungan efisiensi realisasi anggaran badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan kabupaten minahasa utara dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan kabupaten minahasa utara dari Tahun 2011-2015 kurang efisien dalam penggunaan realisasi anggaran. Tingkat efektivitas realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan kabupaten minahasa utara dari Tahun 2011-2015 sudah dikategorikan sangat efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada realisasi anggaran tersebut.

Kemudian Rusita (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari Tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*). Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada Tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Sedangkan Yunianti (2015) melakukan penelitian tentang analisis efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi kinerja keuangan Tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedangkan pada Tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja

keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan Tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%. Berdasarkan naik turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) Tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap Tahun, Tahun 2011 turun 2,90%, Tahun 2012 turun 2,96%, dan Tahun 2013 turun 1,05%. berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi sangat baik, karena pada Tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada Tahun 2013 meningkat 17,43%.

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sunanto (2017)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin	Pengukuran Kinerja APBD atas penerimaan pendapatan asli daerah untuk rasio efisiensi adalah efisien karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% (X<100%). Namun, untuk rasio efektivitas adalah tidak efektif dikarenakan realisasi tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditentukan.	Sama-sama meneliti pada objek efisiensi dan efektivitas	Meneliti pada objek Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin
	Melania (2016)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado	1. Tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado Tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada Tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada Tahun 2013. Pada Tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada Tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. 2. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011 – 2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya Tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan	Sama-sama meneliti pada objek efisiensi da efektivitas realisasi anggaran	Melakukan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado

			anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.		
	Roland (2016)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara	1. Dalam realisasi anggaran dapat dilihat dari tingkat perhitungan efisiensi realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari Tahun 2011-2015 Kurang Efisien dalam penggunaan realisasi anggaran. 2. Tingkat efektivitas realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari Tahun 2011-2015 sudah dikategorikan sangat efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada realisasi anggaran tersebut.	Sama-sama meneliti pada objek efisiensi da efektivitas realisasi anggaran	Melakukan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara

Tabel 2.3
Lanjutan

o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Rusita (2015)	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	1. Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari Tahun 2011-2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*). 2. Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada Tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.	Sama-sama meneliti pada objek yang sama yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran	Melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
	Yunianti (2015)	analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	1. Efisiensi kinerja keuangan Tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedangkan pada Tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan Tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%. 2. Berdasarkan naik turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) Tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap Tahun, Tahun 2011 turun 2,90%, Tahun 2012 turun 2,96%, dan Tahun 2013 turun 1,05%. berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi sangat baik, karena pada Tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada Tahun 2013 meningkat 17,43%.	Sama-sama meneliti pada objek yang sama yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas	Melakukan penelitian pada Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

mber: Data Diolah (2019)

2.9 Kerangka Pemikiran

Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan *(cost of output).* Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya *(spending well).* Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Realisasi anggaran dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas perubahan dan realisasi anggaran Tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu Tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu Tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2011:152) Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya. Terdapat empat aspek dasar desain penelitian yaitu tujuan studi, tingkat intervensi penelitian, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Aspek-aspek tersebut yaitu:

1. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana tingkat efisien, efektivitas, kontribusi dan Pertumbuhan realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.
2. Tingkat intervensi atau tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah minimal, yaitu hanya mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.
3. Unit analisis atau tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintah daerah.
4. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shot* yaitu pengumpulan data yang dilakukan hanya sekali kumpul.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018 yang beralamat di jalan Laksamana Malahayati KM 19 No 12 Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efisiensi, efektivitas, kontribusi, pertumbuhan dan Realisasi anggaran.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data keuangan yang didapat dari Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016-2018. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu secara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:140) pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:175) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskripstif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Realisasi anggaran

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	**Kriteria**
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Efektivitas Realisasi anggaran

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{X } 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efektivitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

3. Kontribusi realisasi anggaran

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{Realisasi\ \ Belanja}{\text{Pendapatan}}\ \text{X}\ 100\%$$

Sumber : Handoko (2013)

4. Pertumbuhan Realisasi anggaran

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun (t}-1)}{\text{Anggaran Belanja Tahun t}}\ \text{x}\ 100\%$$

Sumber: Halim (2012)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BP2IP Malahayati Aceh

4.1.1 Sejarah Berdinya Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh

Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh berlokasi di jalan Laksamana Malahayati Aceh KM. 19 Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan telah telah diresmikan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 oleh Mentri Perhubungan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Pada acara peresmian dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah tanah oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMH) dan Gubernur Aceh. Tanah yang dihibahkan seluas 27,139 M^2 berlokasi di jalan Laksamana Malahayati Aceh KM. 19 Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 23 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)

Malahayati Aceh telah selesai dilaksanakan pada tahun 2013 (Pembangunan tahap IV (empat) yang merupakan pembangunan secara keseluruhan yang tercantum pada Master Plan dan Detail Enginering Design (DED).

Sejak diresmikan pengoperasian pada tanggal 23 November 2012 sampai dengan tahun 2014, BP2IP Malahayati Aceh telah berhasil mencatat capaian kinerja pelayanan diklat yang cukup signifikan. Capaian kinerja dimaksud berupa outcome berbagai kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana meliputi: jumlah pendaftar diklat yang meningkat menunjukkan animo masyarakat yang tinggi dalam merespon keberadan BP2IP Malahayati sebagai lembaga diklat pelayaran. Jumlah jumlah diklat kepelautan baik diklat kompetensi maupun diklat ketrampilan juga menunjukkan perkembangan positif maupun dari segi geografis aceh berada di ujung barat wilayah Indonesia.

Kondisi di atas menjadi acuan dan dasar pemikiran BP2IP Malahayati Aceh dalam pengembangan eselonisasi organisasi dan eselon III/b menjadi eselon III/a sehingga terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2014 Perubahan Atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP2IP Malahayati Aceh. Pada tahun 2015 BP2IP Malahayati Aceh menjadi sebuah Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri keuangan Nomor 1271/KMK.05/2015. BP2IP Malahayati Aceh menetapkan target-target kinerja BLU BP2IP Malahayati Aceh dengan bimbingan Direktorat Pembinaan PK-BLU Kementrian Keuangan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BP2IP Malahayati Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM . 90 Tahun 2017 Tanggal 28 September 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keoala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh (BP2IP) Malahayati Aceh secara administratif di bina oleh Sekteraris Badan Pengembangan Suber Daya manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan), dan secara teknis operasional di bina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDM Hubia). BP2IP Malahayati Aceh di pimpin oleh seorang kepala. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelaksana teknis fungsional dan manajerial di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai dengan peraturan nasional dan international. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BP2IP Malahayati Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dari program.
b. Pelaksanaan urusan dari keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, tata usaha, hubungan masyarakat dan hokum.
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautamn tingkat dasar dan menegah.
d. Pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan.
e. Pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah.
f. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
g. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama .
h. pelaksanaan pemeriksaan intern.
i. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan.
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4.1.3 Visi dan Misi BP2IP Malahayati Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan diklat kepada masyarakat, BP2IP Malahayati Aceh menetapkan visi dan misi sehingga dalam tugas dan fungsi pelayanan bias dilaksanakan secara optimal.

1. Visi

   Dengan ditetapkannya visi BP2IP Malahayati Aceh “menjadi lembaga diklat pelayaran unggulan, dengan menyediakan layanan diklat berkualitas berstandar nasional dan international kepada masyarakat”

2. Misi

   Dengan misi yang di miliki BP2IP Malahayati Aceh memiliki gambaran hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga sesuatu yang masih abstrak terlihat pada visi akanlebih mudah untuk dipahami pada misi yang ada.

   Kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh BP2IP Malahayi Aceh, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana BP2IP Malahayati Aceh memenuhi kebutuhan, tertuang di dalam misi BP2IP Malahayati Aceh sebagai berikut:

   a. Mewujudkan Lulusan Diklat Pelayaran yang prima, professional, dan beretika, memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja pada sub sector transportasi laut baik di dalam maupun di luar negeri.
   b. Menciptakan situasi belajar yang kondusif, efektif dan inofatif yang didukung sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi mutakhir sehingga mampu merangsang motivasi peserta diklat untuk berhasil dalam menyelesaikan tugas menuntut ilmu.
   c. Membangun manajemen mutu organisasi secara bertahap dengan peningkatan kapasitas seluruh sumber daya lembaga diklat secara terus menerus guna memperoleh kinerja pelayaran kinerja pelayanan organisasi yang berkualitas.
   d. Membangun jejaring kerja dengan para stakeholder dunia usaha dan industry subsector transportasi laut dalam rangka pemberian kontribusi dunia usaha kepada leberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan.

4.1.4 Budaya BLU BP2IP Malahayati Aceh

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua operasional organisasi dijalankan dengan mengikuti standar operasiona; danm prosedur (SOP) yang di susun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta mampu merespon perubahan-perubahan serta mengacu pada standar mutu baik nasional maupun international.

Adapun nilai dasar BP2IP Malahayati Aceh adalah:

1. Korporasi
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Kerjasama tim
5. Kualitas dan
6. Transparansi

4.1.5 Stuktur Organisasi BP2IP Malahayati Aceh

Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk suatu langkah awal sebelum ada suatu kegiatan instansi untuk mencapai suatu tujuan instansi. Dengan adanya struktur organisasi maka pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 90 Tahun 2017, terdiri dari:

a. Kepala
b. Satuan Pemeriksaan Intern
c. Subbagian Keuangan Dan Umum
d. Seksi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
e. Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
f. Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama
g. Unit Penunjang, dan
h. Kelompok Jabatan Fuungsional

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2016

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2016.

Tabel 4.1
Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016

URAIAN	2016		Rasio %
	ANGGARAN	REALISASI	
A. Pendapatan			
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	24.382.201.000,-	28.631.373.862,-	117,43
Jumlah Pendapatan	**24.382.201.000,-**	**28.631.373.862,-**	**117,43**
B. Belanja			
Belanja Pegawai	4 .509.470.000,-	3 .981.775.029,-	88,30
Belanja Barang	56.785.829.000,-	49.598.060.013,-	87,34
Belanja Modal	43.737.044.000,-	42.386.458.800,-	96,91
Belanja Sosial	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**105.032.343.000,-**	**95.966.293.842,-**	**91,37**

Sumber : Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh (2016)

Berdasarkan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Bukan Pajak sebesar Rp 28.631.373.862. atau mencapai 117,43% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 24.382.201.000. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 95.966.293.842. atau mencapai 91,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp 105.032.343.000.

4.2.2 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun Anggaran 2017

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Tabel 4.2
Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2017

URAIAN	2017		Rasio %
	ANGGARAN	REALISASI	
A. Pendapatan			
1. Pendapatan Jasa dari Layanan Masyarakat	23,014,125,000,-	21,066,249,005,-	91.54
Pendapatan Hibah	-	-	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	-	370,459,289,-	0.00
Pendapatan PNBP Umum	-	1,502,771,998,-	0.00
Jumlah Pendapatan	**23,014,125,000,-**	**22,939,480,292,-**	**99.68**
B. Belanja			
Belanja Pegawai	5,688,419,000,-	4,084,817,074,-	71.81
Belanja Barang	68,167,177,000,-	58,806,090,452,-	86.27
Belanja Modal	54,655,848,000,-	54,422,816,890,-	99.57
Belanja Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	**128,511,444,000,-**	**117,313,724,416,-**	**91.29**

Sumber: Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh (2017)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 22.939.480.292,- atau mencapai 99.68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan

sebesar Rp. 23.014.125.000,-. Pendapatan negara dan Hibah BP2IP Malahayati Aceh terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Diklat, Pengelolaan BMN, Jasa Perbankan dan Pendapatan Lain-lain. Realisasi belanja BP2IP Malahayati Aceh pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 117,313,724,416,- atau 91.29% dari anggaran senilai Rp. 128.511.444.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2017.

4.2.3 Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2018

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Tabel 4.3

URAIAN	2018		Rasio %
	ANGGARAN	REALISASI	
A. Pendapatan			
1. Pendapatan Jasa dari Layanan Masyarakat	32.774.045.000,-	16.388.273.300,-	50,00
Pendapatan Hibah	-	-	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	-	1.138.226.787,-	0,00
Pendapatan BLU Lainnya		1.138.226.787,-	0,00
Pendapatan dari Pelayanan BLU yangBersumber dari Entitas		6.643.300.000,-	0,00
Pendapatan PNBP Lainnya		64.601.170,-	0,00
Jumlah Pendapatan	**32.774.045.000,-**	**24.234.401.257,-**	**73,94**

B. Belanja			
Belanja Pegawai	6.415.917.000,-	4.459.420.192,-	69,51
Belanja Barang	88.336.347.000,-	73.400.820.641,-	83,09
Belanja Modal	37.955.800.000,-	37.021.057.800,-	97,54
Belanja Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	**132.708.064.000,-**	**114.881.298.633,-**	**86,57**

Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2018

Sumber: Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh (2018)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 24.234.401.257,- atau mencapai 73.94% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 32,774,045,000,-. Pendapatan BP2IP Malahayati Aceh terdiri dari Pendapatan Diklat, Pengelolaan BMN, Jasa Perbankan, Jasa Layanan Kesehatan, Jasa Layanan BLU yang Bersumber dari Entitas dan Pendapatan Lain-lain. Realisasi belanja BP2IP Malahayati Aceh pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 114.881.298.633,- atau 86.57% dari anggaran senilai Rp. 132,708,064,000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh

Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Realisasi anggaran. Rasio efisiensi belanja

merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Halim (2014)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Adapun tingkat efisiensi Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tahun 2016-2018 dapat di lihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Efisiensi Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Rasio %
2016	105.032.343.000,-	53.579.835.042,-	51,01
2017	128,511,444,000,-	62.890.907.526,-	48,93
2018	132.708.064.000,-	77.860.240.833,-	58,67

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat di ketahui bahwa tingkat efisiensi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 dengan nilai rasio sebesar 51,01%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 48,93%, sedangkan pada tahun 2018 jumlah rasionya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 58,67%. Efisiensi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 sampai 2018 sudah termasuk kategori sangat efisien karena nilai rasionya <60%.

Analisis efisiensi anggaran belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh dihitung dengan membandingkan antara tingkat anggaran belanja dengan tingkat realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hasil perhitungan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tahun anggaran 2016 sampai 2018 secara keseluruhan sudah dikelola dengan baik. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum.

4.3.2 Analisis Efektifitas Realisasi anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik Kemampuan instansi dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan instansi yang semakin baik. Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \text{X } 100\%$$

Sumber : Halim (2014)

Metode analisis dimulai dengan perhitungan tingkat efektifitas. Untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Tahun anggaran 2016-2018. Tingkat klasifikasi tentang Kriteria Penilaian efektivitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif

90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Adapun tingkat efektifitas Realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tahun 2016-2018 dapat di lihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Efektifitas Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh Tahun 2016-2018

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio %
2016	105.032.343.000,-	95.966.293.842,-	91,37
2017	128,511,444,000,-	117,313,724,416,-	91.29
2018	132.708.064.000,-	114.881.298.633,-	86,57

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tahun anggaran 2016 dengan nilai rasionya mencapai 91,37%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 91,29%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis jika dibandingkan dengan tahun 2016-2017 yaitu sebesar 86,57%. Tingkat efektifitas realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 dan 2017 sudah termasuk kategori efektif karena nilai rasionya berkisar antara 90% - 100%, sedangkan pada tahun 2018 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya berkisar 80% - 90%.

Efektifitas pelaksanaan belanja pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh cukup bervariasi, tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2018, hal ini karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggarn belanja yang harus di capai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena ada beberapa anggaran belanja yang direalisasikan tidak sesuai dengan target, tetapi anggaran belanja yang lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh.

4.3.3 Analisis Kontribusi Realisasi Anggaran pada BP2IP Malahayati Aceh

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Adapun rumus untuk menghitung Kontribusi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Realisasi Anggaran}} \text{ X } 100\%$$

Sumber : Handoko (2013)

Adapun tingkat kontribusi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tahun 2016-2018 dapat di lihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8

Kontribusi Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh

Tahun	Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio %
2016	24.382.201.000,-	95.966.293.842,-	25,41
2017	23,014,125,000,-	117,313,724,416,-	19,62
2018	32.774.045.000,-	114.881.298.633,-	28,53

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa tingkat kontribusi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh mengalami perubahan secara pluktiatif dimana pada tahun 2016 tingkat rasionya mencapai 25,41%, kemudian pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan jumlah nilai rasionya sebesar 19,62% sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 28,53%.

APBN sebagai intrumen kebijakan fiskal merupakan bentuk intervennsi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, APBN memiliki beberapa fungsi seperti fungsi alokasi, fungsi distyribusi, yang terutama distribusi pendapatan dan fungsi stabilitas. Dengan fungsi-fungsi tersebut maka sangat diharapkan kebijakan fiscal yang dikeluarkan, khususnya kebijakan belanja Negara, bekerja secara tepat, efisien dan berkelanjutan.

4.3.4 Analisis Pertumbuhan Realisasi anggaran pada BP2IP Malahayati Aceh

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah,

perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Analisis Pertumbuhan Belanja Dapat Dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun (t}-1)}{\text{Anggaran Belanja Tahun t}} \text{ x } 100\%$$

Sumber : (Halim:2012)

Adapun tingkat pertumbuhan realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh dapat di lihat pada Tabel di bawah 4.9 berikut.

Tabel 4.9

Pertumbuhan Realisasi Anggaran BP2IP Malahayati Aceh

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio %
2015	-	76.827.141.989	
2016	105.032.343.000,-	95.966.293.842,-	18,22
2017	128,511,444,000,-	117,313,724,416,-	16,61
2018	132.708.064.000,-	114.881.298.633,-	-1,83

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh mengalami perubahan secara pluktuatif dimana pada tahun 2016 tingkat realisasi belanja meningkat dengan tahun sebelumnya sebesar 18,22%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 16,61%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar -1,83%, hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun 2017.

Saat ini sulitnya meningkatkan pertumbuhan belanja modal dibandingkan dengan belanja lainnya selama ini, karena keterbatasan fiscal yang dimiliki pemerintah, sementara itu, kebutuhan pendanaan lainnya juga penting dilakukan.belanja modal memiliki pola pembiayaan berjangka panjang seperti pembuatan jalan, gedung, pembelian tanah dan sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dpembahsan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis efisiensi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 sampai 2018 sudah termasuk kategori sangat efisien karena nilai rasionya <60%.
2. Berdasarkan analisis efektifitas realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh pada tahun 2016 dan 2017 sudah termasuk kategori efektif karena nilai rasionya berkisar antara 90% - 100%, sedangkan pada tahun 2018 termasuk kategori cukup efisien karena nilai rasionya berkisar 80% - 90%.
3. Berdasarkan analisis kontribusi realisasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh mengalami perubahan secara pluktiatif dimana pada tahun 2016 tingkat rasionya mencapai 25,40%, kemudian pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan jumlah nilai rasionya sebesar 19,61% sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 28,52%.
4. Berdasarkan analisis pertumbuhan realisiasi anggaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh mengalami perubahan secara pluktuatif dimana pada tahun 2016 tingkat realisasi belanja meningkat dengan tahun

sebelumnya sebesar 1,86%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 16,61%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar -1,83%, hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun 2017.

1.2 Saran

Alangkah baiknya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh agar dapat menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan. Kepada pihak Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh agar selalu meningkatkan belanja operasional seperti belanja pegawai untuk menciptakan kemakmuran pegawai guna terciptanya kinerja pegawai yang baik. Kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh agar selalu meningkatkan belanja modal seperti belanja tanah, gedung dan asset tetap lainnya. Tingkat efisiensi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh sangat efisien, kepada pihak instansi agar menjaga tingkat belanja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh. Untuk kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh setiap unsur yang terlibat harus dapat bekerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu mandiri dan tidak sangat bergantung pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* : Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Chabib,Sholeh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Edisi keempat. Bandung: Fokusmedia.

Erlina, *et al*. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.

Hafiz, Abdul (2013). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No. 71/2010*. Bandung : Alfabeta,

Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*: Teori, Konsep & Aplikasi. Jakarta. Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2012). *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta. Salemba Empat.

Handoko P, Sri. (2013). *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, diakses pada Tanggal 27 Oktober 2013.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta*: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUI Press.

Mahsun, Mohamad (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2011). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama.

Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Cv. Andi.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Melania, Rampengan. (2016). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 16 No. 03 Tahun 2016.

Nafarin, Muhammad. (2013). *Penganggaran Perusahaan*, cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Dedi & Ayuningtyas (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 Tahun 2013 tentang *pedoman penyusunan laporan keuangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (SAP).

Purnomo. (2013). *Ekonomi Energi Teori Dan Praktik*. Jakarta : LP3ES

Rahardjo, Adisasmita (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Rahmawati,Maulidah. (2012). *Akuntasi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Fokusmedia: Bandung. .

Roland, Gerald. (2016). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Universitas Sam Ratulangi.Volume 16 No. 04.

Rudianto (2012), *Pengantar Akuntansi, konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rusita, Untari. (2015). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro.

Sasongko, Catur dan Parulian (2015). *Anggaran*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Soetjipto, Kery. Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 2 Tahun 2005

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Sunanto. (2017). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Politeknik Sekayu. Jurnal MONEX Vol.6 No 1 Januari 2017.

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintah Daerah*. Di akses 22 November 2018.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.Yogyakarta

Yunianti, Umi. (2015). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)* . Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. ISBN 978-602-73690-3-0: Yogyakarta.